

DEMOKRASI DAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM PILKADA DKI JAKARTA

Musni Umar

Institute For Social Empowerment and Democracy
Jl. Arjuna Utara Tol Tomang, Kebun Jeruk, Jakarta 11510
musni.umar@plasa.com

ABSTRAK

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dibangun dimana rakyat diberi hak untuk menentukan secara politik siapa yang diberi kekuasaan untuk memerintah melalui mekanisme pemilu. Dalam demokrasi, salah satu unsur yang amat penting ialah partisipasi. Di dalam partisipasi terkandung unsur komunikasi politik. Pilkada DKI Jakarta terjadi komunikasi politik yang mencederai demokrasi, karena yang dominan berperan adalah budaya rekayasa sebagai akibat kuatnya pengaruh politik uang dan kepentingan para elit politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Kata Kunci: Demokrasi, komunikasi politik, Pilkada DKI Jakarta

Pendahuluan

Demokrasi adalah satu konsep tentang bentuk bernegara dari sistem liberalisme, yang merupakan suatu sistem hak turut menentukan secara politik yang memungkinkan setiap warga negara mempunyai pengaruh kepada keputusan-keputusan politik.

Untuk memahami arti demokrasi, maka dapat merujuk kepada dua kata dalam bahasa Yunani yaitu “*demos*” (rakyat) dan “*kratein*” (Pemerintahan). Dengan demikian secara harfiah demokrasi berarti ‘pemerintahan oleh rakyat’, yaitu satu sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui wakil-wakil mereka yang dipilih dalam pemilihan umum, karena kegiatan pemerintah di lapangan umum dan pemerintahan. (C.Schmitter, Terry Lynn Karl, 1991).

Dengan pengertian itu, maka Gordon Marshall (1994) menjelaskan bahwa demokrasi adalah “*rule of the citizens*” (the *demos*), and was designed to allow all citizens to have a voice in decisions that would affect all. This right was exercised at mass meetings, and approximated to what we would today call direct democracy”.

Dalam demokrasi, salah satu unsur yang amat penting ialah penyertaan politik (political participation) yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang demokratis. Menurut Herbert Mc Closky

(1972) dalam *International Encyclopedia of Social Sciences* bahwa, the term “*political participation*” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy”. Norman H. Nie dan Sidney Verba (1975) dalam *Handbook of Political Science*, menyatakan bahwa penyertaan politik ialah, “*those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take*”.

Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson (1977) dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* menjelaskan bahwa penyertaan politik ialah, “*activities by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*”.

Jika berbicara tentang demokrasi dalam Pilkada DKI yang didalamnya terkandung salah satu unsur yang amat penting yaitu partisipasi politik, maka bagian yang sangat menentukan ialah adanya komunikasi politik. Maka dapat dikatakan tidak ada demokrasi dan partisipasi politik yang *genuine* tanpa adanya komunikasi politik. Dalam kasus pilkada DKI nampak tidak ada komunikasi politik yang bersifat *autonomous participation* yang memberi alternatif dan peluang kepada rakyat DKI Jakarta untuk memilih

pemimpin DKI Jakarta yang mereka inginkan. Ini terjadi karena komunikasi politik yang dijalankan sarat dengan kepentingan politik yang diwarnai politik uang.

Permasalahan

Dalam amalan demokrasi politik di DKI Jakarta, ada beberapa isu yang dapat dijadikan permasalahan:

1. Isu budaya.

Masyarakat DKI Jakarta terutama elit politiknya, belum memiliki budaya demokrasi. Dalam kasus pembentukan Koalisi Jakarta oleh partai-partai politik besar untuk menghadang calon dari PKS., nampak sekali belum ada budaya demokrasi. Seharusnya dalam alam demokrasi, sesuai pengertian demokrasi bahwa yang berdaulat adalah rakyat, maka sepatutnya calon Gubernur DKI Jakarta lebih dari dua calon, supaya rakyat DKI Jakarta yang majemuk memiliki banyak pilihan. Akan tetapi, yang menonjol adalah budaya politik rekayasa seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

2. Isu kelas menengah (*middle class*).

Dalam masyarakat Jakarta, kelas menengah masih kurang. Pada hal yang dapat menjadi penyokong utama tegaknya demokrasi adalah kelas menengah. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi politik tanpa kelas menengah. Dalam masyarakat DKI Jakarta yang menonjol adalah kelas atas (*the haves*) dan kelas bawah (*the haves not*) atau yang dikenal dengan istilah “*wong cilik*” (orang kecil) dan “*wong gedhe*” (orang besar). Di era Orde Baru, kelas menengah tidak dibolehkan tumbuh dan berkembang secara kuat dan mampu berdiri sendiri (berdikari), karena dikhawatirkan kelas menengah yang besar bilangannya akan dapat menjadi penggerak utama (*prime mover*) dalam mengamalkan demokrasi politik. William Liddle mengatakan bahwa jika demokrasi akan dijalankan, syarat pertama yang harus dipenuhi ialah terbinanya pertumbuhan kelas menengah, yaitu golongan sosial yang secara ekonomi cukup bebas. Ia melihat tumbuhnya golongan ini dipelbagai daerah seperti para pensiunan tentera dan pegawai pemerintah sebagai elit politik yang mempunyai orientasi nasional, tetapi hal itu belum memadai. (William Widdle, 1997).

3. Isu kemiskinan dan ekonomi.



Bila mengacu standar Bank Dunia (World Bank), bahwa seseorang dikatakan tidak miskin jika berpenghasilan US\$2/hari, atau dengan kurs Rp 9000/dolar (Rp 540,000/bulan), maka jumlah masyarakat miskin di DKI Jakarta diperkirakan mencapai 60% dari total penduduk DKI Jakarta. Kondisi sekarang, di mana berlaku ekonomi liberal dan pasar bebas (*free fight competition*), keadaan

mereka amat menderita. Dalam masyarakat yang mayoritas miskin, sesungguhnya demokrasi dan komunikasi politik hanya bersifat formalitas karena yang menonjol adalah kepentingan mempertahankan hidup sehingga berlaku demokrasi perut.

4. Isu pendidikan.

Hingga hari ini, kemiskinan dan proses pemiskinan terus terjadi, ditandai dengan

makin menurunnya kualitas hidup dan banyaknya anak-anak miskin tidak sekolah. Achmad Fedyani Saifuddin, guru besar antropologi sosial dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa "menghadapi kenyataan ini, fenomena kemiskinan dan proses pemiskinan harus dilihat secara riil. Tidak cukup hanya mengandalkan data statistik". Menurut, gejala pemiskinan itu bisa dilihat dari kenyataan sehari-hari, kian banyak anak-anak yang berkeliaran atau bekerja di jalanan, tingginya angka putus sekolah, serta semakin banyak kendaraan roda dua di jalan yang biasanya dimiliki penarik ojek. Kondisi yang dihadapi kaum miskin sangat pesimistis bisa memberikan bekal pendidikan kepada anak-anak mereka, minimal hingga jenjang SLTA. Umumnya, kendala yang mereka hadapi adalah belitan kemiskinan sehingga prioritas pendidikan tergeser oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Ketidakmampuan masyarakat miskin menyekolahkan anak mereka ke jenjang lebih tinggi sejalan dengan hasil kajian Direktorat Agama dan Pendidikan, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2006. Angka siswa SD yang tak melanjutkan pendidikan ke SLTP pada tahun 1996 sebanyak 48,57 persen, dari 866.308 siswa SD yang melanjutkan ke SLTP hanya 445.535 orang. Pada tahun 1997 meningkat menjadi 49,30 persen, tahun 1998 meningkat menjadi 49,83 persen, tahun 1999 menjadi 51,81 persen, tahun 2000 menjadi 52,98 persen, dan pada tahun 2001 melonjak menjadi 54,11 persen. (Vincentia Hanni, 2003).

Angka putus sekolah yang tinggi terpotret di seluruh wilayah DKI Jakarta. Di setiap wilayah, angka siswa SD yang tak melanjutkan ke SLTP di atas 50 persen.

5. Isu pengangguran.

Pengangguran di DKI Jakarta tergolong besar. Dari tahun ke tahun angka pengangguran terus meningkat. Menurut data Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, pada tahun 2002, dari jumlah penganggur yang sudah mencapai 605.924 orang, yang terserap ke lapangan kerja hanya 155.700 orang atau hanya sekitar 25,6 persen. Tahun 2004 satu juta pengang-

guran terbuka, baik di Jakarta ataupun dari luar Jakarta, menunggu dan berburu lapangan kerja di Jakarta. (Zulfikar Bakar, 2007).

Ketidakterseriusan pemerintah daerah ini muncul berdasarkan penilaian publik terhadap kondisi riil dalam mendapatkan kerja di daerahnya. Secara merata, dilihat dari kota domisili, sekitar 72 persen responden menilai saat ini kian sulit mendapatkan pekerjaan di kantor swasta. Bahkan, di kantor-kantor pemerintah kondisinya lebih sulit lagi karena 86 persen responden menganggap sulit untuk masuk di lembaga-lembaga pemerintah selama proses seleksi masih dibumbui sistem koneksi.

Minimnya lapangan kerja formal sebenarnya telah disiasati oleh sebagian para pencari kerja dengan memasuki sektor informal. Di Jakarta, misalnya, sektor informal berpotensi dalam mendominasi lapangan pekerjaan. Meskipun sulit mencari data jumlah pekerja di sektor tersebut, dapat dipastikan bahwa jumlahnya melebihi angka pengangguran terbuka. Sayangnya, bergeliatnya sektor informal ini tidak serta-merta mendapatkan dukungan positif dari pemerintah setempat.

Tinjauan Teori

Dalam membicarakan masalah demokrasi dan komunikasi politik, saya mencoba menggunakan "teori budaya" (cultural theory). Hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan para pemerhati di Latin Amerika, Eropa Timur dan Asia Timur yang menyimpulkan bahwa: *Cultural factors played an important role in the problems they were encountering with democratization. Simply adopting a democratic constitution was not enough. Cultural factors have been omitted from most empirical analyses of democracy partly because, until now, we have not had reliable measures of them from more than a handful of countries. When cultural factors are taken into account, as in the work of the Inglehart 1990, 1997, and Putnam (1993, they seem to play an important role.* (Ronald Inglehart, 2000). Selain itu, digunakan pula teori budaya politik (*theory of political culture*). Gabriel A. Almond dan Sidney Verba (1963), adalah dua orang sarjana yang pertama kali mengkaji tentang budaya politik demokrasi, yang ditulis dalam buku "*The*

Civic of Culture”, yang melukiskan keyakinan politik, aspirasi, emosi, serta penyertaan aktivitas rakyat dalam politik. Akan tetapi, dalam tahun-tahun 1970-an, terdapat berbagai pendekatan budaya yang disokong dengan satu pertanyaan penting yaitu apakah masyarakat mempunyai budaya politik yang relatif baik untuk demokrasi?

Sonia Alvares, Evelina Dagnino and Aruro Escobar (1998) mengatakan bahwa “budaya politik” merupakan hasil kegiatan dari praktik dan institusi, yang terbentuk dari keseluruhan realitas masyarakat, yang secara sejarah dianggap sebagai hasil praktik politik secara baik (dengan cara yang sama dengan bidang lain yang dianggap sebagai bidang “ekonomi”, “budaya” dan “sosial”). Sedang Mare Edelman (1999) menggambarkan bahawa budaya politik sebagai “sejenis unsur budaya” yang dikatakannya mungkin tidak memadai untuk bertanggungjawab atas perkembangan institusi demokrasi di Costa Rica tetapi telah mendukung perkembangan institusi demokrasi di negara tersebut. (Sonia Alvares, 1998).

Morris Janowitz dan Dwaine Marvick (1956) membincangkan teori sosial yang mengatakan; perlunya memberi perhatian utama berkaitan dengan kondisi sosial seperti pendidikan yang berfungsi mendukung sistem politik demokrasi. (S.M Lipset, 1959). Sedang Oscar Lewis (1996, 1966, 1998), mengemukakan sembilan macam karakteristik yang menunjukkan adanya budaya kemiskinan yaitu:

The people in the culture of poverty have a strong feeling of marginality, of helplessness, of dependency, of not belonging. They are like aliens in their own country, convinced that the existing institutions do not serve their interests and needs. Along with this feeling of powerlessness is a widespread feeling of inferiority, of personal unworthiness. This is true of the slum dwellers of Mexico City, who do not constitute a distinct ethnic or racial group and do not suffer from racial discrimination. In the United States the culture of poverty of the Negroes has the additional disadvantage of racial discrimination.

Dalam praktik, nilai budaya apapun yang dianut oleh masyarakat, jika ia dominan maka akan berperan dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dominan itu, biasanya lebih dari satu aliran budaya. Dalam kaitan itu, memahami nilai-nilai budaya yang dominan (*dominant culture*) di dalam

satu masyarakat sangat penting, tidak sahaja untuk mengetahui arah sosial dan politik ke masa depan, tetapi juga untuk memberi ramalan-ramalan yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, penting pula memahami nilai budaya yang dominan di masyarakat karena dalam proses pembangunan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan masyarakat demi mencapai satu kemajuan.

Penyertaan (*participation*)

Gerakan reformasi 1998 di Indonesia telah membawa bangsa Indonesia memasuki era demokrasi, tetapi belum berhasil menetapkan falsafah demokrasi yang tepat, “apakah demokrasi *“the winner take off”* atau demokrasi yang artinya dalam bahasa Jawa: *“setitik-setitik dibagi-bagi”*, dalam arti semua orang mendapat bagian mes-kipun kecil, gotong-royong atau musyawarah untuk mencapai mufakat atau dengan cara pemilihan. Proses mencari format demokrasi yang sesuai dan tepat bagi bangsa Indonesia dan masyarakat Jakarta khususnya, sangat *“crucial”* dan tidak menguntungkan, karena setiap berganti rezim yang berkuasa, dapat saja berubah arah demokrasi, sehingga tidak pernah ada kemandapan dan kematangan dalam mengamalkan suatu sistem demokrasi. Sebagai gambaran, sejak merdeka 1945 Indonesia telah mempopulerkan dan mengamalkan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan pada era reformasi kembali mengamalkan demokrasi liberal.

Demokrasi langsung (*direct democracy*) seperti yang pernah diamalkan masyarakat Yunani di Athens, sukar dilaksanakan sekarang ini, karena semakin ramainya penduduk dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia. Itu sebabnya *“founding fathers”* Indonesia mengisytiarkan negara Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung yang diwujudkan dengan memilih calon anggota legislatif di semua tingkatan dalam suatu pemilu, yang akan mewakili rakyat di di parlemen.

Dalam teori politik, terdapat dua macam amalan demokrasi politik yang selalu dilaksanakan untuk mendapat sokongan dari masyarakat yaitu partisipasi politik yang otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized partici-*

pation). (Samuel P. Huntington, Joan M. Nelson, 1977). Penyertaan politik masyarakat Jakarta belum sepenuhnya otonom, karena budaya politik di kalangan elit dan masyarakat belum wujud. Ini disebabkan pengetahuan dan fahaman tentang arti demokrasi khususnya partisipasi politik dalam berdemokrasi masih rendah, sehingga tidak tumbuh kesadaran dan penyertaan yang suka rela baik pemilu Presiden/Wakil Presiden, pemilu legislatif maupun pilkada.

Dalam realitas, yang diamalkan oleh masyarakat Jakarta ialah penyertaan politik yang dimobilisasi, yaitu seorang calon atau melalui tim kampanye, mengamalkan dan menghalalkan segala macam kegiatan untuk menang dalam pemilu, sehingga terlibat dalam politik uang, dan berbagai jalan yang tidak sepatutnya diamalkan. Dengan demikian, kelihatannya bahwa demokrasi berjalan baik karena telah dilaksanakan proses dan prosedur menurut undang-undang. Masyarakat berbondong-bondong menghadiri kampanye, namun motif kehadiran mereka di arena kampanye itu bukanlah karena kesadaran untuk menyertai kegiatan politik yang otonom, tetapi didorong oleh adanya hiburan musik, diberi uang, dan disediakan pengangkutan, dan pada hari dan tempat yang ditetapkan, rakyat memberi undi untuk memilih calon ahli anggota DPR, calon Presiden/Wakil Presiden. Ini karena pada umumnya mereka memilih calon, melalui orang-orang kepercayaannya yang telah memberi uang atau bahan makanan atau atas kehendak gusti (*patron*).

Komunikasi politik

Salah satu dimensi penting dalam amalan demokrasi khususnya dalam rangka pilkada DKI Jakarta ialah adanya komunikasi politik. Ia mencakup sekurang-kurangnya dua hal yaitu:

1. Dimensi vertikal yaitu komunikasi politik antara elit politik dengan masyarakat pemilih. Para elit politik dari partai-partai politik seharusnya membangun komunikasi politik secara timbal balik dengan masyarakat untuk menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Akan tetapi dalam realitas, para elit politik tidak melakukannya dengan konstituen karena besarnya godaan politik uang dan kepentingan politik untuk melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu, yang

menonjol bukan budaya politik yang demokratis, tetapi “budaya rekayasa” politik yang sering diamalkan pada masa Orde Baru untuk mengelabui masyarakat. Dalam rekayasa politik ini diduga keras mereka menerima setoran uang yang amat besar dari calon yang diusung. Amalan demokrasi semacam ini amat merugikan pengembangan demokrasi di masa depan karena segala cara dilakukan untuk memperoleh keuntungan materiil berupa setoran uang dan kepentingan politik pragmatis untuk meraih kemenangan dengan mengorbankan demokrasi yang beradab.

2. Dimensi horizontal yaitu komunikasi politik antara partai-partai politik dengan para calon Gubernur DKI Jakarta. Model komunikasi politik yang dijalankan adalah tertutup dan tidak transparan. Ini terjadi karena diduga keras ada tawar-menawar besarnya setoran uang yang harus diberikan setiap calon Gubernur DKI Jakarta kepada partai-partai politik. Mereka yang tidak memiliki kekuatan uang yang besar dengan mudah dikalahkan oleh calon yang beruang dan mempunyai keberanian untuk spekulasi membayar lebih besar kepada partai-partai politik. Oleh karena sistem komunikasi politik semacam ini yang diamalkan, maka akhirnya hanya melahirkan dua calon Gubernur DKI Jakarta. Seorang calon yaitu Fauzi Bowo didukung 20 partai politik sementara Adang Darajatun hanya didukung satu partai politik yaitu PKS.

Hasil komunikasi politik semacam itu, sangat tidak sehat dalam membangun sistem demokrasi yang baik dan sehat, karena idealnya membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada calon-calon lain termasuk calon independen untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Implikasi Politik

Terjadinya rekayasa politik dalam proses pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 yang diduga keras diwarnai politik uang, akan memberi implikasi politik hasil pilkada dan pembangunan demokrasi. Pertama, rakyat bisa bangkit memberi sokongan yang amat besar kepada calon PKS karena merasa

simpati adanya pengeroyokan 20 partai politik. Hal ini sangat mungkin terjadi sebagai protes terjadinya kezaliman politik yang dilakukan partai-partai politik baik terhadap calon PKS maupun calon-calon lain yang disingkirkan.

Kedua, koalisi Jakarta yang terdiri dari 20 partai politik merasa terancam oleh calon PKS dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, sehingga membentuk koalisi bersama yang dimotori partai Golkar dan didukung PDI-P, partai Demokrat, PPP dan partai-partai gurem untuk memastikan mereka memenangkan pilkada DKI Jakarta.

Ketiga, secara tidak disadari mereka dijabat oleh PKS dalam pilkada DKI Jakarta, sehingga secara moral dan politik apapun hasil pilkada DKI, yang keluar sebagai pemenang adalah PKS. Pilkada DKI Jakarta akan melambungkan nama PKS dan hampir dipastikan akan memberi keuntungan dalam pemilu 2009.

Keempat, partai-partai politik yang bergabung dalam koalisi Jakarta telah memberi pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat dalam berdemokrasi. Tidak saja karena menutup munculnya calon-calon pemimpin DKI Jakarta yang lebih bervariasi dan lebih berkualitas, tetapi menutup partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang lebih baik dan lebih berkualitas untuk memimpin DKI Jakarta.

Kelima, semakin merusak citra partai politik karena secara kasat mata diduga keras melakukan politik uang dalam negosiasi pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kondisi semacam ini dapat dirasa kentalnya politik uang, sehingga dapat bersatu mendukung Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Keenam, akan semakin menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme di DKI Jakarta, pada hal beberapa waktu lalu Lembaga Transparansi Internasional Indonesia pernah memberitakan bahwa DKI Jakarta sebagai daerah paling tinggi tingkat korupsinya.

Kesimpulan

Demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, telah dibelokkan oleh para elit politik untuk mewujudkan pemerintahan dari kemauan elit politik yang dipak-

sakan untuk dipilih oleh rakyat Jakarta dalam rangka melanggengkan kepentingan mereka.

Komunikasi politik dalam mewujudkan demokrasi politik yang partisipatif dan *genuine* tidak wujud dalam pilkada di Jakarta, karena kuatnya tarikan *money politics* dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta dan kepentingan elit partai-partai politik. Politik uang dan kepentingan elit politik untuk melanggengkan hegemoni mereka dalam kekuasaan, telah bertemu dengan kepentingan Fauzi Bowo sebagai *incumbent* Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk meraih kekuasaan sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan menghalalkan segala cara.

Proses politik dalam tahapan pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta telah memberi pelajaran buruk bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai *agent of reformation*, *agent of change* dan *agent of future* saatnya bangkit menjadi pemandu perubahan dengan memberi pencerahan kepada masyarakat DKI Jakarta supaya tidak memilih calon yang disodorkan para elit politik karena lebih banyak mudaratnya bagi rakyat dan bangsa Indonesia daripada manfaatnya.

Daftar Pustaka

- C. Schmitter and Terry Lynn Karl, "What Democracy is Philippe ... and is not", dalam *Journal of Democracy*, Vol. 2, No. 3, 1991.
- Eberhard Puntsch, "Politik dan Martabat Manusia", Occasional Papers and Documents, Friedrich-Naumann-Stiftung, Jakarta, 1998.
- Gordon Marshall, "The Concise Oxford Dictionary of Sociology", Oxford University Press, Oxford New York, 1994.
- Herbert Mc Closky, "Political Participation", dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*, The Macmillan Company and the Free Press, Edisi ke 2, Jilid XII, New York, 1972.
- Norman H. Nie & Sidney Verba, "Political Participation", dalam *Handbook of Political Science*, Fred I. Greenstone & Nelson W.

- Polsky (eds.), Reading, Mass Addison-Wesley Publishing Company, 1975.
- Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, “*No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*”, Harvard University Press, NY, 1977.
- William Liddle, “Islam, Politik dan Modernisasi”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Vincentia Hanni S, “Duh, Mahalnya Sekolah di Jakarta”, Kompas, Jakarta, 2003.
- Zulfikar Bakar, “Pengangguran Ancam Jakarta”, Goggles, <http://skypin.tripod.com/kolum/kolum41.html>, 2007.
- Ronald Inglehart, Culture and democracy, dalam Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington (penyt.), “*Culture Matters How Values Shape Human Progress*”, Basic Books, New York, 2000.
- Sonia E. Alvarez, et al, (Eds.), “*Introduction: the Cultural and Political in Latin American Social Movements*”, In Cultures of Politics Politics of Cultures. S.E. Alvarez, E. Dagnino, and A Escobar, Boulders. Co: Westviews Press, 1998.
-
- _____, “*Cultures of Politics and Politics of Cultures: Revisioning Latin American Social Movements*”, Boulder, Co. Westview Press, 1998.
- S. M. Lipset, “*Political Man*”, Heinemann Educational Books Ltd, London, 1959.
- Oscar Lewis, *Culture of Poverty*. wikipedia, the free encyclopedia, [org/wiki/culture_of_poverty](http://wiki/culture_of_poverty), 1998.
- Sulastomo, “Mencari Format Demokrasi Indonesia”, dalam *Indonesia Ekspres*, Edisi 02, 1-24, 2005.
- Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, “*No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*”.